



**RANCANGAN AKHIR**  
**RENCANA KERJA (RENJA)**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024**

---

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Sunan Muria No. 9 Kode Pos 59313 Kudus

Telp. (0291) 438713

E-mail : [kominfo@kuduskab.go.id](mailto:kominfo@kuduskab.go.id)

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Alloh SWT , karena berkat Rahmat dan hidayahnya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Rankhir Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 Kabupaten Kudus telah selesai.

Renja Rankhir Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus ini disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus tahun 2024 yang telah ditetapkan pada tanggal 11 Juli 2023 dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 20 tahun 2023. Secara tatacara, penyusunan Renja Rankhir Dinas Komunikasi dan Informatika mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD,RPJMD dan RKPD. Secara substansi mempedomani RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2024.

Dokumen Renja Rankhir Dinas Komunikasi dan Informatika memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator dan target serta pagu indikatif. Rumusan program kegiatan dan subkegiatan sebagaimana telah tertuang dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2024 dengan tetap berpedoman pada Renstra Bappeda Tahun 2024-2026 dan RPD Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026.

Renja Rankhir Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 menjadi acuan penyusunan RKA sebelum disahkan menjadi DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus.

Dokumen Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 ini masih belum sempurna sehingga saran, masukan dan kritik konstruktif terbuka bagi kami untuk kesempurnaannya, yang pada akhirnya dengan berpedoman pada dokumen ini, kita dapat optimal melaksanakan pelayanan kepada masyarakat melalui perencanaan yang berkualitas.

Kudus, Juli 2023  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA

**DWI YUSI SASEPTI, S.Sos, MM**

Pembina Tk. I  
NIP. 19740919 199303 2 002

## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| HALAMAN COVER .....   | 1         |
| KATA PENGANTAR .....  | 2         |
| DAFTAR ISI.....   | 3         |
| DAFTAR GAMBAR.....  | 4         |
| DAFTAR TABEL .....  | 5         |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>  | <b>6</b>  |
| 1.1. Latar Belakang .....   | 6         |
| 1.2. Landasan Hukum .....   | 8         |
| 1.3. Maksud dan Tujuan .....  | 11        |
| 1.4. Sistematika Penulisan .....  | 12        |
| <b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH</b>   |           |
| <b>TAHUN LALU .....</b>   | <b>15</b> |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun<br>2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ..... | 15        |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas<br>Komunikasi dan Informatika .....                                 | 30        |
| 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan<br>tugas dan fungsi SKPD .....                                       | 32        |
| 2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD.....  | 35        |
| <b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....</b>  | <b>45</b> |
| 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....   | 45        |
| 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi<br>dan Informatika.....                                    | 46        |
| <b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN</b>   |           |
| <b>PERANGKAT DAERAH .....</b>   | <b>48</b> |
| 4.1. Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan Terhadap<br>Rumusan Program dan Kegiatan .....               | 48        |
| 4.2. Rekapitulasi Program dan Kegiatan.....   | 48        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>  | <b>62</b> |

## **DAFTAR GAMBAR**

|   |   |
|---|---|
| Gambar 1.1 Hubungan Rencana Kerja dengan Dokumen<br>Perencanaan dan Penganggaran Lainnya..... | 7 |
|---|---|

## **DAFTAR TABEL**

|   |    |
|---|----|
| Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022 Kabupaten Kudus ..... | 18 |
| Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus .....  | 31 |
| Tabel 2.3 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....   | 33 |
| Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024 Kabupaten Kudus .....   | 36 |
| Tabel 3.2 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026.....              | 47 |
| Tabel 4.2 Rumusan Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 .....                    | 51 |

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (Pasal 2 ayat (2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

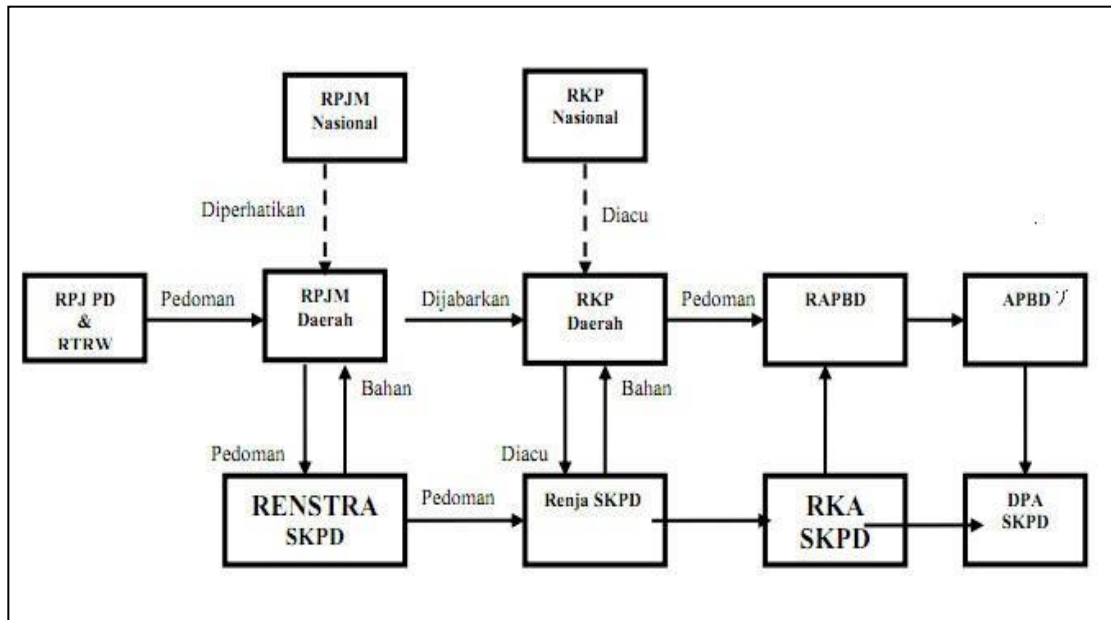
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah. pasal 11 ayat 3 huruf b, disebutkan bahwa rencana perangkat daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Adapun keterkaitan antara Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus terhadap dokumen

perencanaan yang lain dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut :

Gambar 1.1  
Hubungan Rencana Kerja dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya



Dengan memperhatikan Gambar 1.1 dapat diketahui, bahwa pada tingkat perangkat daerah, dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dijadikan sebagai pedoman dalam penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah setelah disahkan melalui Keputusan Bupati dan ditetapkan Kepala Daerah menjadi Renja Perangkat Daerah yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dengan mengacu pada KUA-PPAS yang telah disepakati oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD. RKA Perangkat Daerah yang telah sesuai dengan KUA-PPAS selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD. RAPBD yang telah disetujui Kepala Daerah dan pimpinan DPRD kemudian dievaluasi oleh Gubernur, untuk selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi APBD.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2024 berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2024–2026; dan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2023.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2024 disusun sebagai dokumen perencanaan untuk periode 2024 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat di bidang komunikasi dan informatika yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Kudus serta berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga -Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 107);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022

- Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 248);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 249);
  20. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 10);
  21. Peraturan Bupati Kudus Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 20). Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus;
  22. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus;
  23. Peraturan Bupati Kudus Nomor 62 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 62);
  24. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 10).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 yaitu menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah :

- 1) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan program dan kegiatan antara daerah dengan provinsi dan pusat .

- 2) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan.
- 3) Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 disusun sebagai berikut :

##### **Bab I. PENDAHULUAN**

###### **1.1 Latar Belakang**

Pengertian Ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Tinda Lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

###### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang UU, PP, Perda dan Keentuan peraturan lainnya yang megatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam peyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

###### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan renja Perangkat Daerah.

###### **1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Pokok – pokok materi yang disampaikan antara lain :

- a. Realisasi rogram/ kegiatan/ sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan .
- b. Realisasi program/kegiatan/subkegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- c. Realisasi program/ kegiatan/sb kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.
- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya atau terpenuhinya target kinerja rogram/kegiatan/ subkegiatan ;
- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra perangkat daerah
- f. Kebijakan yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fngsi perangkat daerah

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Bab III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Bab IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH  
Berisi tentang faktor-faktor yang terjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan; uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan; serta tabel rencana program dan kegiatan:

Bab V. PENUTUP

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan Kepala Perangkat Daerah beserta cap stempel Perangkat Daerah.

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kinerjanya, namun demikian juga terdapat beberapa sasaran strategis yang tidak berhasil diwujudkan pada empat tahun terakhir ini. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta obyek pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika maka dalam pelaksanaan diperlukan suatu indikator kinerja untuk mengukur tingkat capaian serta keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja yang tidak berhasil diwujudkan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang tertuang dalam RKPD dengan realisasi masing-masing keluaran kegiatan.

Berdasarkan Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2022, secara garis besar tercapai dapat diurai sebagai berikut :

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :
  1. Program Aplikasi Informatika dengan dua target indikator yaitu :
    - 1) Tata Kelola SPBE sebesar 2.43 Indeks, tercapai 1,9 Indeks
    - 2) Kebijakan internal SPBE sebesar 3,06 Indeks, tercapai 2,3 Indeks
  2. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan target indikator jumlah perangkat daerah/unit kerja yang terhubung jaringan fiber optik sebesar 20 unit kerja, tercapai 70%.

- b. Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :
1. Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan target indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Kominfo) sebesar 83,5 Indeks telah tercapai melalui 8 kegiatan yaitu:
    - 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - 3) Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
    - 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  2. Program Informasi dan Komunikasi Publik dengan pencapaian indikator cakupan informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media sebesar 100% telah tercapai melalui 1 kegiatan yaitu :
    - 1) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  3. Program aplikasi informatika dengan target indikator Layanan SPBE sebesar 2.7 indeks telah tercapai melalui 1 kegiatan yaitu :
    - 1) Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  4. Program penyelenggaraan statistik sektoral dengan target indikator program Cakupan pelayanan data statistik sektoral sebesar 100% telah tercapai melalui 1 kegiatan yaitu :
    - 1) Penyelenggaraan statistik sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.
  5. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi dengan target indikator persentase perangkat



daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah sebesar 18% telah tercapai melalui 1 kegiatan yaitu :

- 1) Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

c. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan

- 1) Faktor utama terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah dukungan dana dari APBD
- 2) Perencanaan program/kegiatan yang berkualitas
- 3) Koordinasi yang baik dengan instansi terkait

Untuk mengetahui sejauh mana pencapaian Renstra SKPD sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah dan  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2023 Kabupaten Kudus

| No              | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                       | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan | Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2024) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s.d Tahun 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022 |                               |                       | Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Th. 2023 (tahun berjalan) |  |
|-----------------|---|--|--|--|--|-------------------------------|-----------------------|---|---|--|
|                 |   |  |  |  | Target Renja PD Tahun 2022   | Realisasi Renja PD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) |   | Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun Tahun 2023                   | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1               | 2   | 3  | 4  | 5  | 6  | 7                             | 8=(7/6)               | 9   | 10=(5+7)  | 11=(10/4)                                    |
| X.XX.01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>      | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)                    | 43 nilai   | N/A  | N/A  | N/A                           | N/A                   | N/A   | N/A   | N/A  |
| X.XX.01.2.01    | <i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | <i>Presentase Capaian Kinerja Subgiat Perangkat Daerah</i>             | 100 persen   | N/A  | N/A  | N/A                           | N/A                   | N/A   | N/A   | N/A  |
| X.XX.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         | Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah                            | 8 dokumen  | 8 dokumen  | 8 dok  | 8 dok                         | 100%                  | 8 dok   |   |  |
| X.XX.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                       | Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah                       | 3 laporan  | 3 laporan  | 3 lap  | 3 lap                         | 100%                  | 3 laporan   |   |  |

| No                  | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan | Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2024) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s.d Tahun 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022 |                               |                       | Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Th. 2023 (tahun berjalan) |  |
|---------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------|-----------------------|---|---|--|
|                     |  |  |  |  | Target Renja PD Tahun 2022   | Realisasi Renja PD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) |   | Realisasi capaian program dan kegiatan s/d Tahun 2023                         | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1                   | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7                             | 8=(7/6)               | 9   | 10  | 11=(10/4)                                    |
| <b>X.XX.01.2.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                    | <b>Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA</b>               | <b>100 persen</b>                                      | <b>29 dok</b>  | <b>29 dok</b>  | <b>29 dok</b>                 | <b>100%</b>           | <b>12 laporan</b>                                 | <b>12 laporan</b>   | <b>-</b>                                     |
| X.XX.01.2.02.01     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN                      | 26 orang/bulan   | 25 orang   | 27 orang   | 23 orang                      | 85,19%                | 26 orang/bulan                                    |   |  |
| X.XX.01.2.02.02     | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN     | 12 dokumen   | 12 bulan   | 12 bulan   | 12 bulan                      | 100%                  | 12 dokumen  |   |  |
| X.XX.01.2.02.03     | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD    | 12 dokumen   | 12 bulan   | 12 bulan   | 12 bulan                      | 100%                  | 12 dokumen  |   |  |
| <b>X.XX.01.2.03</b> | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>    | <b>Presentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset</b>      | <b>100 persen</b>                                      | <b>1 dokumen</b>   | <b>1 dokumen</b>   | <b>1 dokumen</b>              | <b>100%</b>           | <b>100%</b>                                       | <b>100%</b>   | <b>100%</b>                                  |
| X.XX.01.2.03.02     | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                              | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD                     | 1 dokumen  | 1 dokumen  | 1 dokumen  | 1 dokumen                     | 100%                  | 1 dokumen   |   |  |

| No                  | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                             | Indikator Kinerja Program (Outcome ) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan             | Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2024) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s.d Tahun 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022 |                               |                       | Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Th. 2023 (tahun berjalan) |  |
|---------------------|---|---|--|--|--|-------------------------------|-----------------------|---|---|--|
|                     |   |   |  |  | Target Renja PD Tahun 2022   | Realisasi Renja PD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) |   | Realisasi capaian program dan kegiatan s/d Tahun 2023                         | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1                   | 2   | 3   | 4  | 5  | 6  | 7                             | 8=(7/6)               | 9   | 10=(5+7)  | 11=(10/4)                                    |
| <b>X.XX.01.2.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>              | <b>Presentase ASN PD yang memenuhi JP pertahun</b>                                  | <b>12 persen</b>                                       | <b>N/A</b>   | <b>N/A</b>   | <b>N/A</b>                    | <b>N/A</b>            | <b>N/A</b>  | <b>N/A</b>  | <b>N/A</b>                                   |
| X.XX.01.2.05.09     | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 3 orang  | N/A  | 27 orang   | 23 orang                      | 85,19                 | 3 orang   |   |  |
| X.XX.01.2.05.10     | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                      | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan Perundang-Undangan                | 500 orang  | N/A  | N/A  | N/A                           | N/A                   | 10800 orang                                       |   |  |
| <b>X.XX.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                     | <b>Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar</b>                    | <b>100 persen</b>                                      | <b>N/A</b>   | <b>N/A</b>   | <b>N/A</b>                    | <b>N/A</b>            | <b>100 persen</b>                                 | <b>N/A</b>  | <b>N/A</b>                                   |
| X.XX.01.2.06.02     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                  | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan                      | 40 paket   | 40 jenis   | 40 jenis   | 40 jenis                      | 100 persen            | 40 paket  |   |  |

| No                  | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                       | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan | Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2024) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s.d Tahun 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022 |                               |                       | Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Th. 2023 (tahun berjalan) |  |
|---------------------|---|--|--|--|--|-------------------------------|-----------------------|---|---|--|
|                     |   |  |  |  | Target Renja PD Tahun 2022   | Realisasi Renja PD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) |   | Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun Tahun 2023                   | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1                   | 2   | 3  | 4  | 5  | 6  | 7                             | 8=(7/6)               | 9   | 10=(5+7)  | 11=(10/4)                                    |
| X.XX.01.2.06.04     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan                     | 1 paket  | 1 tahun  | 1 tahun  | 1 tahun                       | 100 persen            | 1 paket   |   |  |
| X.XX.01.2.06.05     | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                               | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan            | 7 paket  | 7 jenis  | 7 jenis  | 7 jenis                       | 100 persen            | 7 paket   |   |  |
| X.XX.01.2.06.06     | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan     | 12 dokumen   | 8 jenis  | 96 eksemplar   | 79 eksemplar                  | 82,29%                | 12 dokumen  |   |  |
| X.XX.01.2.06.09     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD    | 12 laporan   | 1 tahun  | 1 tahun  | 1 tahun                       | 100%                  | 12 laporan  |   |  |
| <b>X.XX.01.2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>Persentase pengadaan BMD sesuai ketentuan</b>                       | <b>100 persen</b>                                      | <b>12 unit</b>   | <b>12 unit</b>   | <b>21 unit</b>                | <b>100%</b>           | <b>13 unit</b>                                    | <b>33 unit</b>  | <b>N/A</b>                                   |
| X.XX.01.2.07.05     | Pengadaan Mebel   | Jumlah paket mebel yang disediakan                                     | 2 unit   | 4 unit   | 21 unit  | 21 unit                       | 100%                  | 5 unit  |   |  |

| No                  | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan                 | Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2024) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s.d Tahun 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022 |                               |                       | Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Th. 2023 (tahun berjalan) |  |
|---------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------|-----------------------|---|---|--|
|                     |  |  |  |  | Target Renja PD Tahun 2022   | Realisasi Renja PD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) |   | Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun Tahun 2023                   | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1                   | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7                             | 8=(7/6)               | 9   | 10  | 11=(10/4)                                    |
| X.XX.01.2.07.10     | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan   | 6 unit   | 8 unit   | -  | -                             | -                     | 9 unit  |   |  |
| <b>X.XX.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | <b>Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu</b>                         | <b>100 persen</b>                                      | <b>7 dokumen</b>   | <b>7 dokumen</b>   | <b>7 dokumen</b>              | <b>100%</b>           | <b>12 laporan</b>                                 | <b>N/A</b>  | <b>N/A</b>                                   |
| X.XX.01.2.08.01     | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat  | 4 laporan  | 4 jenis  | 4 jenis  | 4 jenis                       | 100%                  | 4 laporan   |   |  |
| X.XX.01.2.08.02     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | 12 laporan   | 1 tahun  | 1 tahun  | 1 tahun                       | 100%                  | 12 laporan  |   |  |
| <b>X.XX.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>Persentase BMD dalam kondisi baik</b>   | <b>100 persen</b>                                      | <b>12 unit</b>   | <b>12 unit</b>   | <b>12 unit</b>                | <b>100%</b>           | <b>21 unit</b>                                    | <b>N/A</b>  | <b>N/A</b>                                   |

| No                  | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan                                      | Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2024) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s.d Tahun 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022 |                               |                       | Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Th. 2023 (tahun berjalan) |  |
|---------------------|--|---|--|--|--|-------------------------------|-----------------------|---|---|--|
|                     |  |   |  |  | Target Renja PD Tahun 2022   | Realisasi Renja PD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) |   | Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun Tahun 2023                   | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1                   | 2  | 3   | 4  | 5  | 6  | 7                             | 8=(7/6)               | 9   | 10=(5+7)  | 11=(10/4)                                    |
| X.XX.01.2.09.02     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah jasa kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | 12 unit  | 1 tahun  | 1 tahun  | 1 tahun                       | 100%                  | 12 unit   |   |  |
| X.XX.01.2.09.06     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | <i>Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara</i>   | 50 unit  | 9 jenis  | 9 jenis  | 9 jenis                       | 100%                  | 70 unit   |   |  |
| <b>2.16.02</b>      | <b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>   | <b>Nilai Survey Kepuasan Publik</b>   | <b>82 nilai</b>  | <b>N/A</b>   | <b>N/A</b>   | <b>N/A</b>                    | <b>N/A</b>            | <b>N/A</b>  | <b>N/A</b>  | <b>N/A</b>                                   |
| <b>2.16.02.2.01</b> | <b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>                              | <b>Persentase respon masyarakat terhadap konten yang dipublikasikan</b>                                     | <b>100 persen</b>                                      | <b>N/A</b>   | <b>N/A</b>   | <b>N/A</b>                    | <b>N/A</b>            | <b>N/A</b>  | <b>N/A</b>  | <b>N/A</b>                                   |
| 2.16.02.2.01.02     | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik   | Jumlah dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi publik   | 8 dokumen  | N/A  | N/A  | N/A                           | N/A                   | N/A   |   |  |

| No              | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan                                | Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2024) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s.d Tahun 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022 |                               |                       | Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Th. 2023 (tahun berjalan) |  |
|-----------------|--|---|--|--|--|-------------------------------|-----------------------|---|---|--|
|                 |  |   |  |  | Target Renja PD Tahun 2022   | Realisasi Renja PD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) |   | Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun Tahun 2023                   | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1               | 2  | 3   | 4  | 5  | 6  | 7                             | 8=(7/6)               | 9   | 10=(5+7)  | 11=(10/4)                                    |
| 2.16.02.2.01.03 | Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah | Jumlah dokumen hasil monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah | 215 dokumen  | 200 kegiatan   | 200 kegiatan   | 455 kegiatan                  | 100%                  | 200 dokumen                                       |   |  |
| 2.16.02.2.01.04 | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik                       | Jumlah dokumen hasil pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik                       | 200 dokumen  | 5 kegiatan   | 824 konten   | 320 konten                    | 38,83%                | 2004 dokumen                                      |   |  |
| 2.16.02.2.01.06 | Pelayanan Informasi Publik   | Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik   | 25 dokumen   | N/A  | N/A  | N/A                           | N/A                   | 20 dokumen  |   |  |
| 2.16.02.2.01.07 | Layanan Hubungan Media   | Jumlah laporan hubungan media   | 2 layanan  | N/A  | N/A  | N/A                           | N/A                   | N/A   |   |  |
| 2.16.02.2.01.08 | Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan  | Jumlah Dokumen kemitraan dengan pemangku kepentingan  | 2 dokumen  | N/A  | N/A  | N/A                           | N/A                   | 1 dokumen   |   |  |



| No                  | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan                                 | Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2024) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s.d Tahun 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022 |                               |                       | Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Th. 2023 (tahun berjalan) |  |
|---------------------|---|--|--|--|--|-------------------------------|-----------------------|---|---|--|
|                     |   |  |  |  | Target Renja PD Tahun 2022   | Realisasi Renja PD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) |   | Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun Tahun 2023                   | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1                   | 2   | 3  | 4  | 5  | 6  | 7                             | 8=(7/6)               | 9   | 10=(5+7)  | 11=(10/4)                                    |
| 2.16.02.2.01.13     | Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                  | Jumlah sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi public pemerintah daerah Kabupaten/Kota | 1 unit   | 5 titik  | 20 unit  | 20 unit                       | 100%                  | 7 unit  |   |  |
| <b>2.16.03</b>      | <b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>   | <b>Nilai SPBE domain tata kelola</b>   | <b>3,2 nilai</b>                                       | <b>2,29 nilai</b>  | <b>2,43 indeks</b>   | <b>1,9 indeks</b>             | <b>78,19%</b>         | <b>3 indeks</b>                                   | <b>4,19 indeks</b>  | <b>100%</b>                                  |
| <b>2.16.03.2.01</b> | <b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>Presentase perangkat daerah/unit kerja yang terlayani jaringan fiber optik</b>                      | <b>70 persen</b>                                       | <b>N/A</b>   | <b>N/A</b>   | <b>N/A</b>                    | <b>N/A</b>            | <b>N/A</b>  | <b>N/A</b>  | <b>N/A</b>                                   |
| 2.16.03.2.01.03     | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah   | Jumlah system jaringan intra Pemerintah Daerah   | 209 unit   | 20 unit kerja  | 20 unit kerja  | 209 unit kerja                | 100%                  | 209 unit kerja                                    |   |  |

| No              | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan   | Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2024) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s.d Tahun 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022 |                               |                       | Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Th. 2023 (tahun berjalan) |  |
|-----------------|---|--|--|--|--|-------------------------------|-----------------------|---|---|--|
|                 |   |  |  |  | Target Renja PD Tahun 2022   | Realisasi Renja PD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) |   | Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun Tahun 2023                   | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1               | 2   | 3  | 4  | 5  | 6  | 7                             | 8=(7/6)               | 9   | 10=(5+7)  | 11=(10/4)                                    |
| 2.16.03.2.02    | <b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>                   | <b>Jumlah aplikasi yang dikelola di pusat data</b>   | <b>94 aplikasi</b>                                     | <b>2 aplikasi</b>  | <b>10 aplikasi</b>   | <b>16 aplikasi</b>            | <b>100%</b>           | <b>127 unit</b>                                   | <b>18 aplikasi</b>  | <b>19,15%</b>                                |
| 2.16.03.2.02.03 | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah  | Jumlah pusat data pemerintahan daerah yang dikelola  | 1 unit   | 9 aplikasi   | 1 aplikasi   | 3 aplikasi                    | 100%                  | 1 unit  |   |  |
| 2.16.03.2.02.07 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik                      | Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan                                     | 1 unit   | N/A  | N/A  | N/A                           | N/A                   | 3 unit  |   |  |
| 2.16.03.2.02.10 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah | 1 dokumen  | N/A  | N/A  | N/A                           | N/A                   | 1 dokumen   |   |  |

| No              | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (Outcome ) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan  | Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2024) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s.d Tahun 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022 |                               |                       | Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Th. 2023 (tahun berjalan) |  |
|-----------------|---|--|--|--|--|-------------------------------|-----------------------|---|---|--|
|                 |   |  |  |  | Target Renja PD Tahun 2022   | Realisasi Renja PD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) |   | Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun Tahun 2023                   | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1               | 2   | 3  | 4  | 5  | 6  | 7                             | 8=(7/6)               | 9   | 10=(5+7)  | 11=(10/4)                                    |
| 2.20.02         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>   | <b>Indeks pembangunan statistik</b>  | <b>2,8 indeks</b>                                      | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>N/A</b>                    | <b>N/A</b>            | <b>N/A</b>  | <b>N/A</b>  | <b>N/A</b>                                   |
| 2.20.02.2.01    | <b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkungan Daerah Kabupaten/Kota</b>                         | <b>Persentase ketercukupan data statistic sektoral</b>   | <b>100 persen</b>                                      | <b>N/A</b>   | <b>18%</b>   | <b>82%</b>                    | <b>100%</b>           | <b>100%</b>                                       | <b>N/A</b>  | <b>N/A</b>                                   |
| 2.20.02.2.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistic sektoral  | Jumlah dokumen koodinasi dan sinkronisasi Pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistic sektoral | 1 dokumen  | N/A  | N/A  | N/A                           | N/A                   | 1 dokumen   |   |  |
| 2.20.02.2.01.02 | Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | Jumlah SDM yang meningkat kapsitasnya dalam peningkatan mutu statistik daeran yang terintegrasi                    | 60 orang   | -  | 60 orang   | 60 orang                      | 100%                  | 200 orang   |   |  |

| No              | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan  | Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2024) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s.d Tahun 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022 |                               |                       | Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Th. 2023 (tahun berjalan) |  |
|-----------------|--|---|--|--|--|-------------------------------|-----------------------|---|---|--|
|                 |  |   |  |  | Target Renja PD Tahun 2022   | Realisasi Renja PD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) |   | Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun Tahun 2023                   | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1               | 2  | 3   | 4  | 5  | 6  | 7                             | 8=(7/6)               | 9   | 10=(5+7)  | 11=(10/4)                                    |
| 2.21.02         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>                                     | <b>Indeks Keamanan Informasi (KAMI)</b>   | <b>250 indeks</b>                                      | N/A  | N/A  | N/A                           | N/A                   | N/A   | N/A   | N/A  |
| 2.21.02.2.01    | <i>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>            | <i>Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian</i> | <b>54 persen</b>                                       | N/A  | N/A  | N/A                           | N/A                   | N/A   | N/A   | N/A  |
| 2.21.02.2.01.03 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah Kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik                   | 1 laporan  | N/A  | N/A  | N/A                           | N/A                   | 1 laporan   |   |  |
| 2.21.02.2.01.04 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                   | Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan kemanan informasi  | 7 Perangkat Daerah                                     | N/A  | N/A  | N/A                           | N/A                   | 7 Perangkat Daerah                                |   |  |

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

- Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan SPBE yang mendasari implementasi SPBE di Kabupaten Kudus telah mencakup domain manajemen dan pengaturan beberapa indikator tata kelola
- Ketersediaan dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE - Beberapa layanan telah diintegrasikan dengan aplikasi lain
- Telah dilakukan evaluasi terhadap layanan administrasi maupun layanan publik untuk peningkatan layanan SPBE
- Telah memanfaatkan pusat data nasional dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) sebagai backup beberapa layanan SPBE
- Telah tersusunnya daftar data dan metadata statistik sektoral diharapkan akan mempermudah Dinas Kominfo dalam hal ini sebagai walidata dalam pengumpulan data nantinya
- Aplikasi CKAN telah berfungsi dengan baik
- Adanya koordinasi yang baik antara BSSN dan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah dalam memberikan pendampingan insiden keamanan informasi yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Kudus
- Telah dilakukan sosialisasi keamanan informasi kepada perangkat daerah dengan harapan perangkat daerah mendapatkan pengetahuan terkait keamanan informasi dalam upaya melindungi data instansi maupun data pribadi.
- Beberapa aplikasi yang terdaftar pada data center Dinas Kominfo telah dipasang SSL
- Meningkatnya kesadaran perangkat daerah dalam pendaftaran sertifikat elektronik.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika**

Analisis kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika memberi gambaran target dan capaian pelayanan dengan menggunakan indikator SPM (standar pelayanan minimal) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Analisis kinerja pelayanan dapat digunakan sebagai metode untuk mengetahui indikator-indikator kinerja yang telah dipenuhi maupun belum dipenuhi. Analisis kinerja tersebut untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.2

Tabel 2.2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Kudus

| No | Indikator   | SPM/<br>Standart<br>Nasional | IKK | Target Renstra SKPD |            |            |            | Realisasi Capaian |            |            | Proyeksi |            | Catatan |
|----|---|------------------------------|-----|---------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|----------|------------|---------|
|    |   |                              |     | Th<br>2020          | Th<br>2021 | Th<br>2022 | Th<br>2023 | Th<br>2020        | Th<br>2021 | Th<br>2022 | Th 2023  | Th<br>2024 |         |
| 1  | 2   | 3                            | 4   | 12                  | 6          | 7          | 8          | 11                | 12         |            |          | 14         |         |
| 1  | Peningkatan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) |                              | -   |                     | 2,56       | 2,68       |            |                   | 2,53       | 3.38       |          |            |         |
| 2  | Nilai evaluasi SAKIP OPD  |                              | -   |                     | 85,00      | 87,00      |            |                   | 74,14      | 82,37      |          |            |         |
| 3  | Indeks Keterbukaan Informasi Publik                               |                              | -   |                     | 78,00      | 79,00      |            |                   | 88,44      | 85.95      |          |            |         |
| 4  | Cakupan pelayanan data statistik sektoral                         |                              | -   |                     | 100%       | 100%       |            |                   | 100%       | 100%       |          |            |         |
| 5  | Persentase fasilitasi persandian                                  |                              | -   |                     | 15%        | 18%        |            |                   | 12%        | 82%        |          |            |         |
| 1  | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)             |                              | -   | -                   | -          |            | 2.87       |                   |            |            | 3,39     | 3,40       |         |
| 2  | Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah                             |                              | -   | -                   | -          |            | 91.00      |                   |            |            | 74       | 75         |         |
| 3  | Indeks Keterbukaan Informasi Publik                               |                              | -   | -                   | -          |            | 81.00      |                   |            |            | 86       | 87         |         |
| 4  | Indeks Keamanan Informasi (KAMI)                                  |                              | -   | -                   | -          |            | 50%        |                   |            |            | 50%      | 50%        |         |
| 5  | Rasio ketercukupan data statistik sektoral                        |                              | -   | -                   | -          |            | 60%        |                   |            |            | 60%      | 60%        |         |

### **2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD**

Sebagaimana dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus. Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus, maka masalah pokok, masalah dan akar masalah yang dihadapi dalam pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan tugas dan fungsi dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut :



**Tabel 2.3**  
**Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

| NO  | PERMASALAHAN   |  |   |   |
|-----|--|--|---|---|
|     | MASALAH POKOK  | MASALAH  | AKAR MASALAH  | ISU STRATEGIS                             |
| (1) | (2)  | (3)  | (4)   | (5)                                       |
| 1   | Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi | Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung kinerja pemerintahan | koordinasi antar perangkat daerah dan stakeholder belum optimal   | belum optimalnya tata kelola pemerintahan |
|     |  |  | Belum sinkronnya arsitektur daerah dengan arsitektur SPBE Nasional  |   |
|     |  |  | belum optimalnya pengelolaan TIK pendukung SPBE   |   |
|     |  |  | belum terintegrasinya aplikasi informatika dalam penyelenggaraan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik |   |
|     |  | Belum optimalnya penyelenggaraan satu data Indonesia   | Belum optimalnya kualitas ketersediaan Data Statistik Sektoral  |   |
|     |  |  | Tingginya resiko keamanan informasi pemerintah daerah   |   |
|     |  |  | Belum adanya sistem kerja/ kerangka kerja keamanan informasi terstandar   |   |

|   |  |  |  |   |
|---|--|--|--|---|
| 2   | Keterbukaan informasi publik belum optimal | belum optimalnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik | belum efektifnya penerapan standar kerja baku pengelolaan pengaduan dan pelayanan informasi masyarakat | Belum optimalnya penyelenggaraan keterbukaan informasi publik |
|   |  |  | belum optimalnya pengelolaan sumberdaya komunikasi publik  |   |
|   |  |  | belum optimalnya penyebarluasan informasi dan komunikasi publik  |   |
| 3   | Belum optimalnya akuntabilitas kinerja PD  | Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya di tingkat PD        | Belum optimalnya pengelolaan SDM   | Birokrasi yang dinamis dan berintegritas                      |
| Belum optimalnya pengelolaan sarpras  |  |  |  |   |
| Belum optimalnya pengelolaan keuangan   |  |  |  |   |
| Belum optimalnya penyusunan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi prosedur kerja yang terstandar |  |  |  |   |

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD**

Rancangan akhir RKPD Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah disusun dengan berdasar pada RPJMD selanjutnya disesuaikan dengan analisis perkembangan dinamika kebutuhan yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan juga mengakomodir isu-isu penting yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

Review terhadap rancangan akhir RKPD selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024.

Tabel 2.4  
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024  
Kabupaten Kudus

| Kode            | Rancangan Awal RKPD   |   |                      |                                 |            | Hasil Analisis Kebutuhan                            |                      |                                 | Catatan Penting |
|-----------------|---|---|----------------------|---------------------------------|------------|---|----------------------|---------------------------------|-----------------|
|                 | Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan           | Indikator Kinerja Program / Kegiatan                | Target Capaian Kerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Lokasi     | Indikator Kinerja Program / Kegiatan                | Target Capaian Kerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                 |
| 1               | 2   | 3   | 4                    | 5                               | 6          | 7   | 8                    | 9                               | 10              |
| 2               | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR     |   |                      | 23.369.618.000                  |            |   |                      | 18.628.300.000                  |                 |
| 2 16            | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                     |   |                      | 23.369.618.000                  |            |   |                      | 18.181.491.000                  |                 |
| 2 16 01         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA               | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD) | 43                   | 17.034.748.000                  | Kab. Kudus | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD) | 43                   | 12.756.300.000                  |                 |
| 2 16 01 2.01    | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Capaian kinerja subgiat Perangkat Daerah | 100 persen           | 6.992.000                       | Kab. Kudus | Persentase Capaian kinerja subgiat Perangkat Daerah | 100 persen           | 21.730.920                      |                 |
| 2 16 01 2.01 01 | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah              | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah         | 8 dokumen            | 1.100.000                       | Kab. Kudus | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah         | 8 dokumen            | 12.463.650                      |                 |

|   |    |    |      |    |   |   |                   |                      |                   |   |                  |                      |  |
|---|----|----|------|----|---|---|-------------------|----------------------|-------------------|---|------------------|----------------------|--|
| 2 | 16 | 01 | 2.01 | 07 | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                    | 3 laporan         | 5.892.000            | Kab. Kudus        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                    | 3 laporan        | 9.267.270            |  |
| 2 | 16 | 01 | 2.02 |    | <b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                        | <b>Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA</b>            | <b>100 persen</b> | <b>3.801.447.000</b> | <b>Kab. Kudus</b> | <b>Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA</b>            | <b>12 bulan</b>  | <b>3.738.994.691</b> |  |
| 2 | 16 | 01 | 2.02 | 01 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN                   | 26 orang/bulan    | 3.701.447.000        | Kab. Kudus        | Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN                   | 26 orang/bulan   | 3.632.261.000        |  |
| 2 | 16 | 01 | 2.02 | 02 | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN  | 12 dokumen        | 85.000.000           | Kab. Kudus        | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN  | 12 dokumen       | 85.860.000           |  |
| 2 | 16 | 01 | 2.02 | 03 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 dokumen        | 15.000.000           | Kab. Kudus        | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 dokumen       | 20.873.691           |  |
| 2 | 16 | 01 | 2.03 |    | <b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>        | <b>Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset</b>   | <b>100 persen</b> | <b>6.100.000</b>     | <b>Kab. Kudus</b> | <b>Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset</b>   | <b>1 tahun</b>   | <b>6.000.000</b>     |  |
| 2 | 16 | 01 | 2.03 | 02 | Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                              | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang milik daerah SKPD                  | 1 dokumen         | 6.100.000            | Kab. Kudus        | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang milik daerah SKPD                  | 1 dokumen        | 6.000.000            |  |
| 2 | 16 | 01 | 2.05 |    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                              | <b>Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun</b>               | <b>12 persen</b>  | <b>9.136.000.000</b> | <b>Kab. Kudus</b> | <b>Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun</b>               | <b>12 persen</b> | <b>5.059.348.539</b> |  |

|          |           |           |             |    |  |   |                   |                    |                   |   |                |                    |  |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|--|---|-------------------|--------------------|-------------------|---|----------------|--------------------|--|
| 2        | 16        | 01        | 2.05        | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi          | Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 3 orang           | 140.000.000        | Kab. Kudus        | Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 3 orang        | 59.348.539         |  |
| 2        | 16        | 01        | 2.05        | 10 | Sosialisasi Peraturan Perundangan-undangan                             | Jumlah orang yang mnegikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan                | 500 orang         | 8.996.000.000      | Kab. Kudus        | Jumlah orang yang mnegikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan                | 500 orang      | 5.000.000.000      |  |
|          |           |           |             |    |  |   |                   |                    |                   |   |                |                    |  |
| <b>2</b> | <b>16</b> | <b>01</b> | <b>2.06</b> |    | <b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                     | <b>Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar</b>                    | <b>100 persen</b> | <b>260.589.000</b> | <b>Kab. Kudus</b> | <b>Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar</b>                    | <b>1 tahun</b> | <b>245.514.950</b> |  |
| 2        | 16        | 01        | 2.06        | 02 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor              | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan                      | 40 paket          | 53.219.000         | Kab. Kudus        | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan                      | 40 paket       | 38.204.000         |  |
| 2        | 16        | 01        | 2.06        | 04 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor                          | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan                                  | 1 paket           | 35.362.000         | Kab. Kudus        | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan                                  | 1 paket        | 35.808.750         |  |
| 2        | 16        | 01        | 2.06        | 05 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan                    | jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan                         | 7 paket           | 20.162.000         | Kab. Kudus        | jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan                         | 7 paket        | 19.687.200         |  |
| 2        | 16        | 01        | 2.06        | 06 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan        | 12 dokumen        | 10.800.000         | Kab. Kudus        | Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan        | 12 dokumen     | 10.800.000         |  |

|   |    |    |      |    |  |  |                   |                      |                   |  |                   |                      |  |
|---|----|----|------|----|--|--|-------------------|----------------------|-------------------|--|-------------------|----------------------|--|
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | 09 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | Jumlah Lapoan Penyelenggaraan Rapat Koodinasi dan Konsultasi Publik                    | 12 laporan        | 141.046.000          | Kab. Kudus        | Jumlah Lapoan Penyelenggaraan Rapat Koodinasi dan Konsultasi Publik                    | 12 laporan        | 141.015.000          |  |
| 2 | 16 | 01 | 2.07 |    | <b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan</b>                                       | <b>100 persen</b> | <b>107.020.000</b>   | <b>Kab. Kudus</b> | <b>Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan</b>                                       | <b>100 persen</b> | <b>24.986.000</b>    |  |
| 2 | 16 | 01 | 2.07 | 05 | Sub Kegiatan Pengadaan Mebel   | jumlah paket mebel yang disediakan   | 2 unit            | 15.860.000           | Kab. Kudus        | jumlah paket mebel yang disediakan   | 2 unit            | 13.986.000           |  |
| 2 | 16 | 01 | 2.07 | 10 | Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan   | 6 unit            | 91.160.000           | Kab. Kudus        | jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan   | 6 unit            | 21.000.000           |  |
| 2 | 16 | 01 | 2.08 |    | <b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | <b>Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu</b>                         | <b>100 persen</b> | <b>3.399.970.000</b> | <b>Kab. Kudus</b> | <b>Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu</b>                         | <b>100 persen</b> | <b>3.395.588.800</b> |  |
| 2 | 16 | 01 | 2.08 |    | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      | jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat  | 4 laporan         | 3.500.000            | Kab. Kudus        | jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat  | 4 laporan         | 3.500.000            |  |
| 2 | 16 | 01 | 2.08 |    | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             | jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 12 laporan        | 3.396.470.000        | Kab. Kudus        | jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 12 laporan        | 3.392.088.800        |  |

|   |    |    |      |    |   |   |                   |                      |                   |   |                   |                      |  |
|---|----|----|------|----|---|---|-------------------|----------------------|-------------------|---|-------------------|----------------------|--|
| 2 | 16 | 01 | 2.09 |    | <b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>Persentase BMD dalam kondisi baik</b>  | <b>100 persen</b> | <b>316.630.000</b>   | <b>Kab. Kudus</b> | <b>Persentase BMD dalam kondisi baik</b>  | <b>100 persen</b> | <b>264.136.100</b>   |  |
| 2 | 16 | 01 | 2.09 | 02 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | jumlah kendaraan dinas perasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | 12 unit           | 267.459.000          | Kab. Kudus        | jumlah kendaraan dinas perasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | 12 unit           | 222.825.100          |  |
| 2 | 16 | 01 | 2.09 | 06 | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara  | 50 unit           | 49.171.000           | Kab. Kudus        | jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara  | 50 unit           | 41.311.000           |  |
|   |    |    |      |    |   |   |                   |                      |                   |   |                   |                      |  |
| 2 | 16 | 02 |      |    | <b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>  | <b>Nilai Survey Kepuasan Publik</b>   | <b>82</b>         | <b>5.105.570.000</b> | <b>Kab. Kudus</b> | <b>Nilai Survey Kepuasan Publik</b>   | <b>82 nilai</b>   | <b>4.423.300.000</b> |  |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 |    | <b>Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>                                  | <b>Persentase respon masyarakat terhadap konten yang dipublikasikan</b>                               | <b>100 persen</b> | <b>5.105.570.000</b> | <b>Kab. Kudus</b> | <b>Persentase respon masyarakat terhadap konten yang dipublikasikan</b>                               | <b>100 persen</b> | <b>4.423.300.000</b> |  |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 02 | Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik   | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik   | 8 dokumen         | 187.500.000          | Kab. Kudus        | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik   | 8 dokumen         | 192.480.000          |  |



|   |    |    |      |    |   |  |             |               |            |  |             |               |  |
|---|----|----|------|----|---|--|-------------|---------------|------------|--|-------------|---------------|--|
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 03 | Sub Kegiatan Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah                                     | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah  | 215 dokumen | 313.500.000   | Kab. Kudus | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah  | 215 dokumen | 313.200.000   |  |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 04 | Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik                        | 200 dokumen | 4.014.570.000 | Kab. Kudus | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik                        | 200 dokumen | 3.307.225.000 |  |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 06 | Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik   | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik  | 25 dok      | 80.000.000    | Kab. Kudus | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik  | 25 dok      | 69.606.000    |  |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 07 | Layanan Hubungan Media  | Jumlah Layanan Hubungan Media  | 2 layanan   | 190.000.000   | Kab. Kudus | Jumlah Layanan Hubungan Media  | 2 layanan   | 184.429.000   |  |
| 2 | 16 | 03 | 2.02 | 08 | Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan   | Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan   | 2 dokumen   | 50.000.000    | Kab. Kudus | Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan   | 2 dokumen   | 53.180.000    |  |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 13 | Sub Kegiatan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 1 unit      | 270.000.000   | Kab. Kudus | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 1 unit      | 303.180.000   |  |
|   |    |    |      |    |   |  |             |               |            |  |             |               |  |

|   |    |    |      |  |   |  |               |               |  |  |                |             |  |
|---|----|----|------|--|---|--|---------------|---------------|--|--|----------------|-------------|--|
| 2 | 16 | 03 |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>  | Nilai SPBE domain tata kelola   | 3,2  | 1.279.300.000 | Kab. Kudus    | Nilai SPBE domain tata kelola  | 3,2 nilai  | 1.001.891.0000 |             |  |
| 2 | 16 | 03 | 2.01 | <b>Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b> | Persentase perangkat daerah/unit kerja yang terlayani jaringan fiber optik          | 70 persen  | 1.000.000.000 | Kab. Kudus    | Persentase perangkat daerah/unit kerja yang terlayani jaringan fiber optik | 70 persen  | 712.263.000    |             |  |
| 2 | 16 | 03 | 2.01 | 03   | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah                | Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah                                       | 209 unit      | 1.000.000.000 | Kab. Kudus   | Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah                                       | 209 unit       | 712.263.000 |  |
| 2 | 16 | 03 | 2.02 |  | <b>Kegiatan Pengelolaan egovernment Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b> | Jumlah aplikasi yang dikelola di pusat data  | 94 aplikasi   | 279.300.000   | Kab. Kudus   | Jumlah aplikasi yang dikelola di pusat data  | 94 aplikasi    | 289.628.000 |  |
| 2 | 16 | 03 | 2.02 | 03   | Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah                             | Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola                                  | 1 unit        | 100.000.000   | Kab. Kudus   | Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola                                  | 1 unit         | 145.028.000 |  |
| 2 | 16 | 03 | 2.02 | 07   | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik            | Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan | 1 unit        | 79.300.000    |  | Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan | 1 unit         | 35.600.000  |  |

|   |    |    |      |    |   |  |                   |                    |                   |  |                   |                   |  |
|---|----|----|------|----|---|--|-------------------|--------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|
| 2 | 16 | 03 | 2.02 | 10 | Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah        | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | 1 dokumen         | 100.000.000        | Kab. Kudus        | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | 1 dokumen         | 109.000.000       |  |
| 2 | 20 |    |      |    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>   |  |                   | <b>129.229.000</b> |                   |  |                   | <b>90.600.000</b> |  |
| 2 | 20 | 02 |      |    | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>   | <b>Indeks Pembangunan Statistik</b>  | <b>2,8</b>        | <b>129.229.000</b> | <b>Kab. Kudus</b> | <b>Indeks Pembangunan Statistik</b>  | <b>2,8</b>        | <b>90.600.000</b> |  |
| 2 | 20 | 02 | 2.01 |    | <b>Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>                               | <b>Persentase ketercukupan data statistik sektoral</b>   | <b>100 persen</b> | <b>129.229.000</b> | <b>Kab. Kudus</b> | <b>Persentase ketercukupan data statistik sektoral</b>   | <b>100 persen</b> | <b>90.600.000</b> |  |
| 2 | 20 | 02 | 2.01 |    | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral      | 1 dokumen         | 124.000.000        | Kab. Kudus        | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral      | 1 dokumen         | 25.600.000        |  |
| 2 | 20 | 02 | 2.02 |    | Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi             | Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi                      | 60 orang          | 5.229.000          |                   | Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi                      | 60 orang          | 65.000.000        |  |
|   |    |    |      |    |   |  |                   |                    |                   |  |                   |                   |  |

|              |    |    |      |    |  |  |  |  |  |                       |            |   |  |                    |  |  |  |                       |             |  |
|--------------|----|----|------|----|--|--|--|--|--|-----------------------|------------|---|--|--------------------|--|--|--|-----------------------|-------------|--|
| 2            | 21 |    |      |    |  |  |  |  |  | 49.208.000            |            |   |  |                    |  |  |  | 356.209.000           |             |  |
| 2            | 21 | 02 |      |    |  |  |  |  |  | 49.208.000            | Kab. Kudus | Indeks Keamanan Informasi (KAMI)  | 250 indeks   |                    |  |  |  | 356.209.000           |             |  |
| 2            | 21 | 02 | 2.01 |    |  |  |  |  |  | 49.208.000            | Kab. Kudus | Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                       | Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dan atau Aplikasi Persandian | 54 persen          |  |  |  |                       | 356.209.000 |  |
| 2            | 21 | 02 | 2.01 | 03 |  |  |  |  |  | 35.000.000            | Kab. Kudus | Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik            | 1 laporan          |  |  |  |                       | 311.209.000 |  |
| 2            | 21 | 02 | 2.01 | 04 |  |  |  |  |  | 14.208.000            | Kab. Kudus | Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                   | Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi  | 7 perangkat daerah |  |  |  |                       | 45.000.000  |  |
| <b>TOTAL</b> |    |    |      |    |  |  |  |  |  | <b>23.548.055.000</b> |            |   |  |                    |  |  |  | <b>18.628.300.000</b> |             |  |

## **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional baik jangka panjang maupun menengah disusun untuk mempercepat perwujudan Visi Presiden Joko Widodo yang menggagas “Impian Indonesia 2015-2025”, salah satunya yaitu Indonesia menjadi pusat pendidikan, teknologi dan peradaban dunia.

Salah satu arahan utama Presiden terkait strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 adalah Pembangunan Sumber Daya Manusia (membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global).

Dalam mendukung pencapaian Tujuh Agenda Pembangunan pada RPJMN 2020-2024, Renstra 2020-2024 Kemenkominfo akan fokus untuk mendukung mewujudkan Transformasi Digital Nasional. Seperti yang dicantumkan di dalam RPJMN, Transformasi Digital Nasional merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Untuk mencapainya, strategi yang dilakukan adalah dengan mengembangkan ekosistem digital nasional (sebagai supply), baik ekosistem infrastruktur TIK maupun ekosistem industri TIK, dan memastikan pemanfaatannya (sebagai sisi demand).

Prioritas pembangunan daerah merupakan penjabaran kebijakan umum yang langsung berhubungan dengan pencapaian sasaran visi dan misi pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026. Pelaksanaan arah kebijakan prioritas pembangunan tersebut adalah dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah disinkronkan dengan program-program yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus, sesuai dengan sasaran pembangunan daerah “Meningkatnya penerapan Sistem Pembangunan Berbasis Elektronik (SPBE)” yaitu sebagai berikut :

- a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah daerah kabupaten / kota

- b. Program informasi dan komunikasi publik
- c. Program Aplikasi Informatika
- d. Program penyelenggaraan statistik sektoral
- e. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika**

Berdasarkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus untuk urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistika, dan urusan persandian, dapat ditetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika. tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus adalah :

1. Terwujudnya digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah  
Indikator tujuan : Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.  
Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah adalah Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah oleh Kementerian PAN RB.
2. Terwujudnya tatakelola Perangkat Daerah yang baik  
Indikator tujuan : Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah  
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah adalah Nilai hasil evaluasi Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat.

Sasaran jangka menengah adalah kondisi-kondisi terukur jangka pendek yang direncanakan dalam rangka mewujudkan tujuan. Untuk mewujudkan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah yang direncanakan akan selalu meningkat yang dapat diukur dengan indikator kinerja saasaran. Sasaran dan indikator sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi.  
Indikator sasarnya : Indeks SPBE
2. Meningkatnya akses terhadap informasi publik.  
Indikator sasarnya : Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah  
Indikator sasarnya : Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus dapat dilihat pada tabel 3.2

**Tabel 3.2**  
**Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**  
**Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2024**

| NO  | TUJUAN   | SASARAN   | INDIKATOR TUJUAN/<br>SASARAN                    | TARGET KINERJA<br>TUJUAN / SASARAN |
|-----|--|---|---|------------------------------------|
|     |  |   |   | 2024                               |
| (1) | (2)  | (3)   | (4)   | (5)                                |
| 1   | Terwujudnya digitalisasi<br>Tata Kelola Pemerintahan<br>Daerah |   | Indeks Reformasi Birokrasi<br>Pemerintah Daerah | 70                                 |
|     |  | Meningkatnya Sistem<br>Pemerintahan Berbasis<br>Teknologi Informasi | Indeks SPBE                                     | 3.50                               |
|     |  | Meningkatnya akses<br>terhadap informasi<br>publik                  | Indeks Keterbukaan Informasi<br>Publik(KIP)     | 87.00                              |
| 2   | Terwujudnya tatakelola<br>Perangkat Daerah yang<br>baik        |   | Indeks Reformasi Birokrasi<br>Perangkat Daerah  | 30.42                              |
|     |  | Meningkatnya<br>akuntabilitas kinerja<br>Perangkat Daerah           | Nilai evaluasi SAKIP Perangkat<br>Daerah        | 82.39                              |

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **4.1. Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan**

Hasil pemetaan nomenklatur rumusan program prioritas dan indikator kinerja program yang direncanakan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026. Program prioritas tersebut merupakan program prioritas Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026.

Adapun hasil pemetaan nomenklatur rumusan program, kegiatan dan subkegiatan dan indikator Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus dituangkan dalam Tabel 4.2. Pada Tahun 2024, total pagu indikatif yang dibutuhkan dalam Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2024 berasal dari Belanja Langsung sejumlah Rp. 17.138.011.800,- yang bersumber dari APBD murni dan dana DBHCHT.

#### **4.2. Rekapitulasi Program dan Kegiatan**

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2024 merupakan urusan wajib bukan pelayanan dasar dengan 3 urusan yaitu urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian yang terdiri dari 5 program yang masing-masing dilaksanakan oleh sekretariat dan 2 (dua) bidang, yang jumlah totalnya terdiri atas 13 kegiatan, 34 sub kegiatan dibiayai dengan APBD dan 1 sub kegiatan dibiayai dengan dana DBHCHT.

Sekretariat menjalankan fungsi umum kesekretariatan melalui 1 program yang terdiri atas 8 kegiatan terkait (1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, (2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, (3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, (4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, (5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, (6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, (7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang



Urusan Pemerintahan Daerah, (8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2024 terdiri dari 5 program dan 13 kegiatan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut :
  - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK, yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut :
  - a. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA, yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut :
  - a. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut :
  - a. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut :
  - a. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Total kebutuhan pagu indikatif dalam Rencana program dan kegiatan Rancangan Akhir Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 17.136.011.800 berasal dari sumber dana APBD Kabupaten Kudus dan dana DBHCHT.

Indikator dan target kinerja rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus pada Tahun 2024 selengkapnya dapat dilihat pada tabel Tabel 4.2

Tabel 4.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024  
dan Perkiraan Maju Tahun 2025

| Kode    | Rencana Tahun 2024  |   |                      |                                 |            | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025                   |                      |                                 | Catatan Penting |
|---------|---|---|----------------------|---------------------------------|------------|---|----------------------|---------------------------------|-----------------|
|         | Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan       | Indikator Kinerja Program / Kegiatan                | Target Capaian Kerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Lokasi     | Indikator Kinerja Program / Kegiatan                | Target Capaian Kerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                 |
| 1       | 2   | 3   | 4                    | 5                               | 6          | 7   | 8                    | 9                               | 10              |
| 2       | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |   |                      | 17.136.011.800                  |            |   |                      | 24.636.038.000                  |                 |
| 2 16    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                 |   |                      | 16.663.261.800                  |            |   |                      | 24.439.757.000                  |                 |
| 2 16 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA           | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD) | 43                   | 12.527.247.368                  | Kab. Kudus | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD) | 44                   | 18.045.147.000                  |                 |

|   |    |    |      |    |  |  |                   |                      |                   |  |                   |                      |  |
|---|----|----|------|----|--|--|-------------------|----------------------|-------------------|--|-------------------|----------------------|--|
| 2 | 16 | 01 | 2.01 |    | <b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> | <b>Persentase Capaian kinerja subgiat Perangkat Daerah</b>         | <b>100 persen</b> | <b>16.551.910</b>    | <b>Kab. Kudus</b> | <b>Persentase Capaian kinerja subgiat Perangkat Daerah</b>         | <b>100 persen</b> | <b>6.993.000</b>     |  |
| 2 | 16 | 01 | 2.01 | 01 | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                     | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                        | 8 dokumen         | 8.484.910            | Kab. Kudus        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                        | 8 dokumen         | 1.100.000            |  |
| 2 | 16 | 01 | 2.01 | 07 | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                   | 3 laporan         | 8.067.000            | Kab. Kudus        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                   | 3 laporan         | 5.893.000            |  |
|   |    |    |      |    |  |  |                   |                      |                   |  |                   |                      |  |
| 2 | 16 | 01 | 2.02 |    | <b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           | <b>Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA</b>           | <b>100 persen</b> | <b>3.725.215.150</b> | <b>Kab. Kudus</b> | <b>Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA</b>           | <b>12 bulan</b>   | <b>4.028.514.000</b> |  |
| 2 | 16 | 01 | 2.02 | 01 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                   | Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN                  | 26 orang/bulan    | 3.632.261.000        | Kab. Kudus        | Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN                  | 26 orang/bulan    | 3.918.276.000        |  |
| 2 | 16 | 01 | 2.02 | 02 | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                       | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | 12 dokumen        | 76.620.000           | Kab. Kudus        | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | 12 dokumen        | 90.000.000           |  |

|          |           |           |             |    |   |   |                   |                      |                   |   |                  |                      |  |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|---|---|-------------------|----------------------|-------------------|---|------------------|----------------------|--|
| 2        | 16        | 01        | 2.02        | 03 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                 | 12 dokumen        | 16.334.150           | Kab. Kudus        | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD                | 12 dokumen       | 20.238.000           |  |
|          |           |           |             |    |   |   |                   |                      |                   |   |                  |                      |  |
| <b>2</b> | <b>16</b> | <b>01</b> | <b>2.03</b> |    | <b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>        | <b>Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset</b>                   | <b>100 persen</b> | <b>6.000.000</b>     | <b>Kab. Kudus</b> | <b>Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset</b>                   | <b>1 tahun</b>   | <b>6.200.000</b>     |  |
| 2        | 16        | 01        | 2.03        | 02 | Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                              | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang milik daerah SKPD                                  | 1 dokumen         | 6.000.000            | Kab. Kudus        | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang milik daerah SKPD                                  | 1 dokumen        | 6.200.000            |  |
|          |           |           |             |    |   |   |                   |                      |                   |   |                  |                      |  |
| 2        | 16        | 01        | 2.05        |    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                              | <b>Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun</b>                               | <b>12 persen</b>  | <b>5.057.785.290</b> | <b>Kab. Kudus</b> | <b>Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun</b>                               | <b>12 persen</b> | <b>9.505.840.000</b> |  |
| 2        | 16        | 01        | 2.05        | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi                 | Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 3 orang           | 57.785.290           | Kab. Kudus        | Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 3 orang          | 150.000.000          |  |
| 2        | 16        | 01        | 2.05        | 10 | Sosialisasi Peraturan Perundangan-undangan                                    | Jumlah orang yang mnegikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan                | 500 orang         | 5.000.000.000        | Kab. Kudus        | Jumlah orang yang mnegikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan                | 500 orang        | 9.355.840.000        |  |

|   |    |    |      |    |   |  |                   |                    |                   |  |                |                    |  |
|---|----|----|------|----|---|--|-------------------|--------------------|-------------------|--|----------------|--------------------|--|
| 2 | 16 | 01 | 2.06 |    | <b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                    | <b>Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar</b>             | <b>100 persen</b> | <b>240.876.350</b> | <b>Kab. Kudus</b> | <b>Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar</b>             | <b>1 tahun</b> | <b>260.600.000</b> |  |
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | 02 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor             | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan               | 40 paket          | 46.499.000         | Kab. Kudus        | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan               | 40 paket       | 53.230.000         |  |
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | 04 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor                         | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan                           | 1 paket           | 23.025.000         | Kab. Kudus        | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan                           | 1 paket        | 35.362.000         |  |
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | 05 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                | jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan                  | 7 paket           | 19.537.350         | Kab. Kudus        | jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan                  | 7 paket        | 20.162.000         |  |
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | 06 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan | 12 dokumen        | 10.800.000         | Kab. Kudus        | Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan | 12 dokumen     | 10.800.000         |  |
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | 09 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD     | Jumlah Lapoan Penyelenggaraan Rapat Koodinasi dan Konsultasi Publik          | 12 laporan        | 141.015.000        | Kab. Kudus        | Jumlah Lapoan Penyelenggaraan Rapat Koodinasi dan Konsultasi Publik          | 12 laporan     | 141.046.000        |  |
|   |    |    |      |    |   |  |                   |                    |                   |  |                |                    |  |

|   |    |    |      |    |  |  |                   |                      |                   |  |                |                      |  |
|---|----|----|------|----|--|--|-------------------|----------------------|-------------------|--|----------------|----------------------|--|
| 2 | 16 | 01 | 2.07 |    | <b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan</b>                                       | <b>100 persen</b> | <b>53.670.000</b>    | <b>Kab. Kudus</b> | <b>Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan</b>                                       | <b>12 unit</b> | <b>170.000.000</b>   |  |
| 2 | 16 | 01 | 2.07 | 05 | Sub Kegiatan Pengadaan Mebel   | jumlah paket mebel yang disediakan   | 2 unit            | 3.857.000            | Kab. Kudus        | jumlah paket mebel yang disediakan   | 2 unit         | 15.860.000           |  |
| 2 | 16 | 01 | 2.07 | 10 | Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan   | 6 unit            | 49.813.000           | Kab. Kudus        | jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan   | 6 unit         | 154.140.000          |  |
|   |    |    |      |    |  |  |                   |                      |                   |  |                |                      |  |
| 2 | 16 | 01 | 2.08 |    | <b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | <b>Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu</b>                         | <b>100 persen</b> | <b>3.173.577.668</b> | <b>Kab. Kudus</b> | <b>Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu</b>                         |                | <b>3.750.000.000</b> |  |
| 2 | 16 | 01 | 2.08 |    | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      | jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat  | 4 laporan         | 3.500.000            | Kab. Kudus        | jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat  | 4 laporan      | 3.500.000            |  |
| 2 | 16 | 01 | 2.08 |    | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             | jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 12 laporan        | 3.170.077.668        | Kab. Kudus        | jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 12 laporan     | 3.746.500.000        |  |
|   |    |    |      |    |  |  |                   |                      |                   |  |                |                      |  |

|   |    |    |      |    |   |   |                   |                      |                   |   |                   |                      |  |
|---|----|----|------|----|---|---|-------------------|----------------------|-------------------|---|-------------------|----------------------|--|
| 2 | 16 | 01 | 2.09 |    | <b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>Persentase BMD dalam kondisi baik</b>  | <b>100 persen</b> | <b>253.571.000</b>   | <b>Kab. Kudus</b> | <b>Persentase BMD dalam kondisi baik</b>  | <b>100 persen</b> | <b>317.000.000</b>   |  |
| 2 | 16 | 01 | 2.09 | 02 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | jumlah kendaraan dinas perasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | 12 unit           | 212.260.000          | Kab. Kudus        | jumlah kendaraan dinas perasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | 12 unit           | 267.829.000          |  |
| 2 | 16 | 01 | 2.09 | 06 | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara  | 50 unit           | 41.311.000           | Kab. Kudus        | jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara  | 50 unit           | 49.171.000           |  |
|   |    |    |      |    |   |   |                   |                      |                   |   |                   |                      |  |
|   |    |    |      |    |   |   |                   |                      |                   |   |                   |                      |  |
| 2 | 16 | 02 |      |    | <b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>  | <b>Nilai Survey Kepuasan Publik</b>   | <b>82</b>         | <b>3.205.446.620</b> | <b>Kab. Kudus</b> | <b>Nilai Survey Kepuasan Publik</b>   | <b>82</b>         | <b>5.116.510.000</b> |  |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 |    | <b>Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>                                  | <b>Persentase respon masyarakat terhadap konten yang dipublikasikan</b>                               | <b>100 persen</b> | <b>3.205.446.620</b> | <b>Kab. Kudus</b> | <b>Persentase respon masyarakat terhadap konten yang dipublikasikan</b>                               | <b>100 persen</b> | <b>5.116.510.000</b> |  |



|   |    |    |      |    |   |   |             |               |            |   |             |               |  |
|---|----|----|------|----|---|---|-------------|---------------|------------|---|-------------|---------------|--|
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 02 | Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik   | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik   | 8 dokumen   | 192.480.000   | Kab. Kudus | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik   | 8 dokumen   | 190.500.000   |  |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 03 | Sub Kegiatan Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah | 215 dokumen | 325.200.000   | Kab. Kudus | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah | 220 dokumen | 313.500.000   |  |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 04 | Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik                       | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik                       | 200 dokumen | 2.129.222.620 | Kab. Kudus | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik                       | 200 dokumen | 4.172.510.000 |  |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 06 | Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik   | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik   | 25 dok      | 82.786.000    | Kab. Kudus | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik   | 25 dok      | 85.000.000    |  |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 07 | Layanan Hubungan Media  | Jumlah Layanan Hubungan Media   | 2 layanan   | 196.677.000   | Kab. Kudus | Jumlah Layanan Hubungan Media   | 2 layanan   | 190.000.000   |  |

|          |           |           |             |    |  |  |                  |                    |                   |  |                  |                      |  |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|--|--|------------------|--------------------|-------------------|--|------------------|----------------------|--|
| 2        | 16        | 03        | 2.02        | 08 | Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan  | Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan   | 2 dokumen        | 53.180.000         | Kab. Kudus        | Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan   | 2 dokumen        | 65.000.000           |  |
| 2        | 16        | 02        | 2.01        | 13 | Sub Kegiatan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota              | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 1 unit           | 225.901.000        | Kab. Kudus        | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 4 unit           | 100.000.000          |  |
|          |           |           |             |    |  |  |                  |                    |                   |  |                  |                      |  |
| <b>2</b> | <b>16</b> | <b>03</b> |             |    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>  | <b>Nilai SPBE domain tata kelola</b>   | <b>3,2</b>       | <b>930.567.812</b> | <b>Kab. Kudus</b> | <b>Nilai SPBE domain tata kelola</b>   | <b>3,2</b>       | <b>1.278.100.000</b> |  |
| <b>2</b> | <b>16</b> | <b>03</b> | <b>2.01</b> |    | <b>Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>Persentase perangkat daerah/unit kerja yang terlayani jaringan fiber optik</b>                      | <b>70 persen</b> | <b>608.098.600</b> | <b>Kab. Kudus</b> | <b>Persentase perangkat daerah/unit kerja yang terlayani jaringan fiber optik</b>                      | <b>70 persen</b> | <b>1.000.000.000</b> |  |
| 2        | 16        | 03        | 2.01        | 03 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah   | Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah   | 209 unit         | 608.098.600        | Kab. Kudus        | Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah   | 209 unit         | 1.000.000.000        |  |
|          |           |           |             |    |  |  |                  |                    |                   |  |                  |                      |  |

|                     |  |  |                    |                    |                   |  |                    |                    |  |
|---------------------|--|--|--------------------|--------------------|-------------------|--|--------------------|--------------------|--|
| <b>2 16 03 2.02</b> | <b>Kegiatan Pengelolaan egovernment Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>                        | <b>Jumlah aplikasi yang dikelola di pusat data</b>   | <b>94 aplikasi</b> | <b>322.469.212</b> | <b>Kab. Kudus</b> | <b>Jumlah aplikasi yang dikelola di pusat data</b>   | <b>94 aplikasi</b> | <b>278.100.000</b> |  |
| 2 16 03 2.02 03     | Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah  | Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola  | 1 unit             | 59.822.000         | Kab. Kudus        | Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola  | 1 unit             | 100.000.000        |  |
| 2 16 03 2.02 07     | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik                                   | Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan                                     | 1 unit             | 105.600.000        |                   | Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan                                     | 1 unit             | 78.100.000         |  |
| 2 16 03 2.02 10     | Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | 1 dokumen          | 157.047.212        | Kab. Kudus        | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | 1 dokumen          | 100.000.000        |  |
| <b>2 20</b>         | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>  |  |                    | <b>90.600.000</b>  |                   |  |                    | <b>142.152.000</b> |  |

|              |   |   |                       |                    |                       |   |                       |                    |  |
|--------------|---|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|---|-----------------------|--------------------|--|
| 2 20 02      | <b>PROGRAM<br/>PENYELENGGARA<br/>AN STATISTIK<br/>SEKTORAL</b>  | <b>Indeks<br/>Pembangu<br/>an Statistik</b>   | <b>2,8</b>            | <b>90.600.000</b>  | <b>Kab.<br/>Kudus</b> | <b>Indeks<br/>Pembangunan<br/>Statistik</b>   | <b>2,8</b>            | <b>142.152.000</b> |  |
| 2 20 02 2.01 | <b>Kegiatan<br/>Penyelenggara<br/>an Statistik Sektoral<br/>di Lingkup Daerah<br/>Kabupaten/Kota</b>              | <b>Persentase<br/>ketercukup<br/>an data<br/>statistik<br/>sektoral</b>   | <b>100<br/>persen</b> | <b>90.600.000</b>  | <b>Kab.<br/>Kudus</b> | <b>Persentase<br/>ketercukupan data<br/>statistik sektoral</b>  | <b>100<br/>persen</b> | <b>142.152.000</b> |  |
| 2 20 02 2.01 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | 1 dokumen             | 25.600.000         | Kab. Kudus            | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | 1 dokumen             | 130.000.000        |  |
| 2 20 02 2.02 | Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi             | Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi                 | 60 orang              | 65.000.000         |                       | Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi                 | 60 orang              | 12.152.000         |  |
| 2 21         | <b>URUSAN<br/>PEMERINTAHAN<br/>BIDANG<br/>PERSANDIAN</b>  |   |                       | <b>382.150.000</b> |                       |   |                       | <b>54.129.000</b>  |  |
| 2 21 02      | <b>PROGRAM<br/>PENYELENGGARA<br/>AN PERSANDIAN<br/>UNTUK<br/>PENGAMANAN<br/>INFORMASI</b>                         | <b>Indeks<br/>Keamanan<br/>Informasi<br/>(KAMI)</b>   | <b>250<br/>indeks</b> | <b>382.150.000</b> | <b>Kab.<br/>Kudus</b> | <b>Indeks Keamanan<br/>Informasi (KAMI)</b>   | <b>250<br/>indeks</b> | <b>54.129.000</b>  |  |

|              |    |    |      |    |   |   |                    |                       |                   |   |                    |                       |  |
|--------------|----|----|------|----|---|---|--------------------|-----------------------|-------------------|---|--------------------|-----------------------|--|
| 2            | 21 | 02 | 2.01 |    | <b>Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>                | <b>Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dan atau Aplikasi Persandian</b> | <b>54 persen</b>   | <b>382.150.000</b>    | <b>Kab. Kudus</b> | <b>Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dan atau Aplikasi Persandian</b> | <b>54 persen</b>   | <b>54.129.000</b>     |  |
| 2            | 21 | 02 | 2.01 | 03 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik                   | 1 laporan          | 337.150.000           | Kab. Kudus        | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik                   | 1 laporan          | 36.000.000            |  |
| 2            | 21 | 02 | 2.01 | 04 | Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                   | Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi   | 7 perangkat daerah | 45.000.000            | Kab. Kudus        | Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi   | 8 perangkat daerah | 18.129.000            |  |
| <b>TOTAL</b> |    |    |      |    |   |   |                    | <b>17.136.011.800</b> |                   |   |                    | <b>24.636.038.000</b> |  |

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus 2024 merupakan pedoman dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2024. Semua usulan program dan kegiatan diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran.

Selain itu, Rencana Kerja ini merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika yang berarti bahwa setiap kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan transparan.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja yang ada ini masih jauh dari sempurna dan membutuhkan kritik dan saran yang dapat membantu penyempurnaannya di masa datang. Terlepas dari itu semua, kami juga berharap bahwa seluruh program kerja yang ada dalam Rencana Kerja ini akan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dan pada akhirnya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik pula.

Kudus,            Juli 2023

  
**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA**  
**DWP YUSI SASEPTI, S.Sos, MM**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19740919 199303 2 002